

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
PADA BANK SAMPAH NGUDI LESTARI DI KELURAHAN
TINJOMOYO KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG**

Vierona Situmeang, R. Slamet Santoso, Hardi Warsono
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id


ACC, 2/10/23

ABSTRAK

Permasalahan sampah yang semakin kompleks membutuhkan tindak lanjut yang harus melibatkan berbagai aktor dengan segala kebijakannya. Kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah menjadi salah satu kebijakan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sampah. Bank Sampah Ngudi Lestari merupakan bank sampah yang dikelola secara mandiri dan sudah mendapatkan bantuan CSR dari Pegadaian. Dalam pelaksanaannya bank sampah ini masih mengalami beberapa kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dan mendeskripsikan faktor yang menjadi kendala di dalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sudah terlaksana dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan anggaran, kegiatan pelatihan serta pendampingan yang dilakukan dan difasilitasi baik dari Pegadaian maupun Dinas Lingkungan, namun demikian sumber daya manusia dan sarana prasarana masih memiliki keterbatasan dalam mencapai tujuan secara optimal. Pelaksanaannya sendiri sudah mengacu pada aspek tata kelola sampah dan bank sampah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yaitu yang berfokus pada pengurangan dan penanganan sampah. Kendala dalam evaluasi ini adalah kepengurusan yang sudah mulai redup, kesadaran masyarakat yang mulai naik turun, serta kendala lain berupa aksesibilitas yang sulit dijangkau. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlunya koordinasi dan sosialisasi secara aktif serta perhatian intens dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah ini.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah.

PENDAHULUAN

Sampah menjadi salah satu sektor yang berkontribusi menciptakan efek emisi gas rumah kaca. Sampah bukan lagi sekadar buruk secara estetika, tetapi juga menjadi pemicu penurunan kualitas lingkungan. Pembakaran sampah secara terbuka, sampah yang dibuang seenaknya, pengelolaan sampah yang masih jauh dari kelayakan serta masih minimnya kegiatan daur ulang sampah merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas lingkungan yang masih terjadi hingga sekarang (*CNN Indonesia, 2022*). Berdasarkan laporan Bank Dunia yang bertajuk *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*, pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan sampah hingga 62,2 juta ton sampah, hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar ke-5 di dunia pada 2020 (Ahdiat, 2023).

Produksi sampah nasional mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa timbunan sampah nasional mencapai 69,2 juta ton, yangmana sebagian besar sampah-sampah tersebut berasal dari kegiatan rumah tangga. Dari total sampah yang dihasilkan, sedikitnya 19,8 juta ton merupakan sampah plastik dan kertas yang belum terpilah, sementara 35,48 persennya masih belum terkelola dengan benar (Primantoro, 2023). Pertumbuhan penduduk yang disertai turut

mempengaruhi sumbangsih sampah, terutama sampah plastik. Berdasarkan *World Population Review* mencatat, hingga 1 November 2022 total penduduk Indonesia menembus 275,5 juta orang. Angka ini membuat peringkat Indonesia berada di posisi keempat dengan penduduk terbanyak di antara negara G20 (Annur, 2022). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) hasil sensus penduduk pada tahun 2020 yang dilakukan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir (Idris, 2021) yakni mencapai angka 270,2 juta jiwa, apabila melihat Sensus Penduduk pada tahun 2010 sebesar 237,63 juta jiwa maka dapat dilihat terjadi peningkatan hasil SP2020 dengan SP2010 sebesar 32,56 juta jiwa (*kompas.com, 2021*).

Peningkatan jumlah penduduk dengan berbagai perilaku pola dan gaya hidup yang tentu membawa konsekuensi terhadap jumlah pasokan sampah. Salah satu perilaku masyarakat tersebut dapat terlihat dari frekuensi belanja online yang sebelumnya hanya sekali sebulan meningkat menjadi satu hingga sepuluh kali per bulannya. Survei yang tercatat dalam Laporan Survei Status Literasi Digital Indonesia, yaitu hasil kolaborasi Katadata *Insight Center* (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

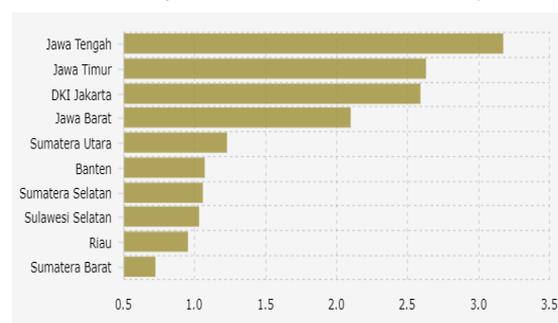
mencatat hanya terdapat 6% masyarakat yang mengaku tidak menggunakan *marketplace* untuk berbelanja, sisanya mengaku pernah menggunakan *platform* lokapasar untuk berbelanja setidaknya beberapa bulan sekali (37,9%), sebulan sekali (27,6%), dua hingga tiga kali dalam sebulan (14%), seminggu sekali (8,4%), dua hingga tiga hari sekali (4,2%), bahkan setiap hari (1,9%) (Haryanti, 2022). Dari aktivitas berbelanja ini hanya sebesar 96% paket belanja online dikemas dengan menggunakan bahan plastik maupun *bubble wrap* (Novelino, 2022).

Berkaca pada data tahun 2021, volume sampah di Indonesia masih terbilang tinggi, yaitu sebesar 68,5 juta ton. Terdapat 24% atau sekitar 16 juta ton sampah yang sampai saat ini belum dikelola. Tercatat, hanya 7% yang terdaur ulang, sementara 69% masuk di TPA (DPR-RI, 2022). Berdasarkan capaian hasil dari penginputan data yang dilakukan oleh 203 Kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2022, diperoleh timbulan sampah sebesar 21,192,511.76 (ton/tahun). Persentase pengurangan sampah sebesar 16.83% atau sebanyak 3,566,882.86 (ton/tahun), dengan persentase penanganan sampah sebesar 48.82% atau sebanyak 10,346,527.89 (ton/tahun). Melihat persoalan di atas, perlu dilakukan kegiatan secara berkelanjutan dalam mengelola dan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam hal

mengelola sampah. Banyaknya penduduk Indonesia tidak menjamin pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik, padahal pengelolaan sampah yang baik dan benar memiliki manfaat bukan hanya terhadap lingkungan, melainkan juga kesehatan. Berdasarkan perolehan data riset Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 diketahui hanya sebesar 20% dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa dari banyaknya penduduk Indonesia yang berjumlah 264.161,2 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52.832,24 juta masyarakat yang mempunyai kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi kebersihan lingkungan dan pengaruhnya terhadap kesehatan (*CNN Indonesia, 2018*).

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik KLHK, provinsi penghasil sampah terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah dimana timbulan sampahnya mencapai 4,3 juta ton pada tahun 2022 (Syauqi, 2022).

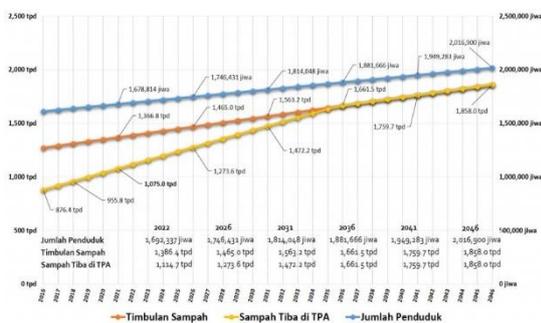
Gambar 1.1
Provinsi jumlah timbulan terbanyak



Sumber: *katadata.co.id, 2022*

Berdasarkan laporan yang dikutip dari laman dprd.jatengprov.go.id, daerah dengan penghasil sampah tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang, Cilacap, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah menjadi salah satu kota penghasil sampah terbanyak di Indonesia, yang mana ibu kota Jawa Tengah ini memproduksi 1.270 ton sampah per hari, dan sekitar 900 ton di antaranya dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setiap hari, namun demikian hanya sebagian kecil sampah yang dilakukan proses daur ulang (Rahmadi, 2022).

Gambar 1.2
Proyeksi timbulan sampah di Kota Semarang



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2022

Pengelolaan sampah di Kota Semarang yang menggunakan konsep 3R sudah diterapkan mulai tahun 1992 dengan difasilitasinya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jatibarang, namun upaya pemerintah ternyata belum mampu mengatasi permasalahan sampah. Jumlah sampah semakin lama semakin bertambah. Pola penanganan ambil-tampung-buang

membuat Kota Semarang akan selalu menemukan kendala minimnya tempat yang menjadi penampungan sampah dan beberapa permasalahan kompleks lainnya.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang dikutip dari laman semarangkota.go.id pada 2021 sampah yang dibawa ke TPA Jatibarang mencapai 1,2 ribu ton lebih per hari atau sekitar 430 ribu ton per tahun. Produksi sampah di Kota Semarang yang dibawa ke TPA itu meningkat 10 persen lebih dibandingkan saat Pandemi Covid-19, dengan produksi sampah 900 ton per hari. Dari banyaknya produksi sampah tersebut, hanya sebagian kecil dari sampah yang didaur ulang, sisanya terbuang ke laut yang kemudian turut berpengaruh bagi lingkungan (Fundrika, 2022). Masih rendahnya tingkat daur ulang sampah ini dikarenakan adanya dependensi atau keterbatasan kemampuan dari para pihak yang berperan dalam proses daur ulang sampah termasuk di dalamnya adalah bank sampah (semarangkota.go.id, 2019).

Mengatasi persoalan diatas, maka pemerintah Kota Semarang beserta dengan sejumlah pihak memberikan solusi dengan memperbaharui sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yang tertuang dalam program bank sampah. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Semarang, hingga pertengahan 2022 sudah berdiri 229 bank sampah yang tersebar di

penjuru wilayah Kota Semarang (Susanto, 2022), hal ini berada jauh dengan jumlah yang sudah ditargetkan sebagaimana dikutip dari laman semarangkota.co.id, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menargetkan jumlah bank sampah sebanyak 1.000 bank sampah di akhir 2023 mendatang (Qudstia, 2023).

Kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah merupakan salah satu kebijakan yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sesuai dengan yang tertuang di dalam Peraturan KLHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Kelurahan Tinjomoyo merupakan salah satu wilayah yang mempunyai bank sampah bernama Ngudi Lestari. Bank sampah ini dalam pelaksanaan pengembangan dan keberlanjutan kebijakan memerlukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang tertuang dalam program kegiatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kehadiran bank sampah di Kelurahan ini pada satu sisi membawa manfaat di berbagai aspek mulai dari lingkungan, sosial, kesehatan, bahkan ekonomi, tetapi pada sisi lain keberhasilan kebijakan masih mengalami permasalahan dalam pengembangan dan keberlanjutan bank sampah, yaitu dari segi motivasi pengurus maupun dukungan masyarakat sekitar (Istanabi et al., 2022). Permasalahan

manajemen diantara anggota pengurus juga sering dialami, jadi dengan demikian, permasalahan yang sering dijumpai dalam pengelolaan bank sampah yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia (Wicaksono & Warsono, 2020). Persoalan SDM dalam pengelolaan sampah pada bank sampah juga ditemui di Bank Sampah Ngudi Lestari, seperti keterbatasan kemampuan manajerial dan keterbatasan kreativitas dalam mengembangkan hasil pemilahan sampah menjadi produk yang lebih bernilai ekonomi, hal ini dikarenakan kondisi pengurus yang sebagian besar sudah lanjut usia, sehingga pelaksanaannya pun tidak optimal (Wibisono, 2019).

Permasalahan yang juga ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah adalah berkaitan dengan pelatihan yang dinilai masih kurang, sehingga perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan secara terus menerus terhadap bank sampah guna memastikan prosesnya bekerja dengan tepat dan dapat berfungsi dengan sebaiknya. Tata kelola sangat beragam serta ketergantungan pada keterlibatan masyarakat dan kapasitas manajerial penyelenggara atau pengurus juga menjadi persoalan yang disebabkan karena sebagian besar bank sampah berdiri atas dasar inisiasi ide atau gagasan dari masyarakat sekitar, sehingga pengelolaannya pun

dilakukan secara swadaya, sesuai kebiasaan, perilaku serta pengalaman.

Pasal 3 Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah menjelaskan bahwa bank sampah harus memenuhi persyaratan pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah, dan tata kelola bank sampah, namun dalam proses kegiatan observasi penulis masih ditemukan masalah mendasar yang belum sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku. Fenomena yang penulis temukan di lapangan antara lain fasilitas bank sampah yang belum sesuai dengan ketetapannya, seperti misalnya belum tersedianya komputer sebagai pendukung kegiatan, kurangnya instrumen penunjang, serta K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) yang belum tersedia, selain itu tata kelola bank sampah Ngudi Lestari sepenuhnya masih dilakukan secara tradisional.

Berdasarkan pada fenomena permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

2. Apa saja yang menjadi kendala keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Mendeskripsikan kendala keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1. Administrasi Publik

Caiden dalam (Mindarti, 2016) mengemukakan bahwa administrasi publik mencakup keseluruhan kegiatan administrasi dalam lingkup urusan public (*administration for the public affairs*). Menurut Barton & Chappel dalam (Stillman, 1991) melihat administrasi publik sebagai aktivitas atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh birokrat dengan fokus pada unsur keikutsertaan pemangku kepentingan dalam melayani publik.

Administrasi publik dalam pengertian luas didefinisikan sebagai pelaksanaan

kegiatan politik melalui kegiatan yang ada dalam negara (Hadjon, 1994), serta merupakan suatu bentuk kerja sama yang ada di dalam 3 wilayah pemerintahan, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Pamudji, 1987). Definisi administrasi publik dalam arti sempit sendiri berkenaan dengan adanya pelaksanaan kepentingan maupun urusan publik yang secara operasional pada umumnya lebih dominan dikerjakan oleh *public bureaucracy* (Mindarti, 2016).

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipahami sebagai salah satu tindakan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, baik dalam bentuk pengaturan ataupun keputusan (Alamsyah, 2016). Dalam hal ini, kebijakan publik adalah hasil dari adanya mekanisme politik yang digerakkan oleh sebuah sistem administrator yang di dalamnya tertanam prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara (Anggara, 2014).

Menurut (Dye dalam Kartasasmita, 1995) kebijakan publik merupakan segala hal yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah (birokrasi) (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam prosesnya tidak hanya mengacu pada upaya pemahaman yang dilakukan oleh

pemerintah terkait masalah, tetapi juga apa yang menjadi penyebab serta bagaimana pengaruh maupun dampak dari kebijakan publik tersebut (Anggara, 2016).

3. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi dalam kebijakan publik merupakan istilah yang merujuk pada tata cara analisis yang dilakukan untuk dua hal. Pertama, sebagai sarana dalam menilai program kebijakan guna memperoleh seluruh data kegiatan dan informasi yang berkenaan dengan keberhasilan proses maupun hasilnya, kedua, sebagai tahapan siklus kebijakan publik yang dalam prosesnya menekankan pada pelaporan kembali informasi pada sebuah kebijakan (Hellmut, 2003). Deskripsi utama dari evaluasi kebijakan yaitu adanya tuntutan yang sifatnya evaluatif, dimana yang menjadi pertanyaan utama bukan lagi terkait fakta maupun aksi, melainkan nilai dan manfaat (William N et al., 2003).

Evaluasi kebijakan publik adalah proses terakhir dalam sebuah kebijakan publik untuk melihat sekaligus menilai sejauh mana kebijakan publik dapat berjalan secara efektif serta mencapai tujuannya (Joko, 2020). Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Purwo, 2010) yang menyatakan bahwa definisi evaluasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan penilaian terkait efektivitas dan keberhasilan program dalam sebuah kebijakan. Evaluasi kebijakan dalam hal ini

mempersoalkan bagaimana implementasi suatu kebijakan dikaji kembali untuk kemudian diidentifikasi hasil serta yang terpenting nilai atau dampaknya (Muchlis, 2014).

Berdasarkan pada pendapat beberapa ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah suatu rangkaian aktivitas maupun kegiatan yang dilaksanakan untuk menemukan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses implementasi secara menyeluruh, untuk nantinya dilakukan proses menilai hasil serta dampak atau manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, yang mana penilaian tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

4. Indikator Evaluasi Kebijakan

Pengukuran evaluasi kebijakan yang digunakan terdiri atas empat indikator sebagai berikut (Badjuri & Yuwono, 2002)).

- 1) Indikator *input*, yaitu pengukuran evaluasi yang berfokus terhadap aspek sumber daya yang mendorong dan mendukung pelaksanaan kebijakan. Aspek yang dimaksud dalam hal ini mencakup sumber daya manusia (SDM), materi, sarana prasarana (infrastruktur), serta aspek pendukung lainnya.
- 2) Indikator *proses*, yaitu pengukuran evaluasi yang dilihat dari adanya

pelayanan yang diberikan langsung bagi masyarakat melalui proses modifikasi dan transformasi sebuah kebijakan. Indikator proses mencakup beberapa aspek diantaranya aspek efektivitas serta efisiensi dari tata cara yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

- 3) Indikator *output* (hasil), yaitu pengukuran evaluasi yang memberikan perhatian pada hasil yang diperoleh dari penerapan sistem dalam kebijakan publik.
- 4) Indikator *outcomes* (dampak), yaitu pengukuran evaluasi yang berfokus pada pertanyaan bagaimana perolehan dampak atau manfaat yang dapat diterima langsung oleh masyarakat yang terlibat dalam kebijakan publik.

5. Kajian tentang Bank Sampah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, dijelaskan bahwa bank sampah merupakan wadah atau sarana untuk mengurus dan mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, serta pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah. Berdirinya bank sampah bertujuan untuk

meningkatkan rasa peduli masyarakat terkait persoalan sampah, untuk memperbaharui sikap dan pola pikir masyarakat bahwa sampah memiliki nilai manfaat, apabila diolah dan didaur ulang (Setiawan, 2015). Manfaat bank sampah, yaitu menekan jumlah sampah di lingkungan, mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, hijau, dan bersih, meningkatkan kreativitas masyarakat melalui kegiatan daur ulang sampah, serta meningkatkan pendapatan ekonomi nasabah yang diperoleh dari penghasilan kegiatan pengumpulan dan penyetoran sampah dalam bentuk rekening (tabungan).

- 1) Bank sampah dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah). Pengelolaan sampah, yaitu meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilaksanakan dengan cara kegiatan pemanfaatan kembali sampah, sementara penanganan sampah dilaksanakan dengan cara pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan atau pengolahan sampah.
- 2) Fasilitas bank sampah, dikelompokkan berdasarkan pada kelompok jenis bank sampah, meliputi Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU)

- 3) Tata kelola bank sampah, dibedakan atas jenis bank sampah, meliputi Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU).

Tata cara atau mekanisme pengelolaan sampah di Bank Sampah dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pengurangan sampah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan kembali sampah, yakni dengan melakukan kegiatan daur ulang secara keseluruhan atau sebagian sampah untuk tujuan dan fungsi tertentu, tanpa terlebih dahulu disertai proses pengolahan. Jenis sampah yang dapat dimanfaatkan kembali antara lain sampah plastic, kertas, logam, dan kaca.

- 2) Penanganan sampah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan mulai dari kegiatan pemilahan, kegiatan pengumpulan, sampai pada kegiatan pengolahan sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian yaitu Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan, dengan triangulasi berdasarkan sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

1) Indikator Input

Indikator input yang dimaksud berkenaan dengan sumberdaya yang menjadi pendukung dalam melaksanakan kebijakan. Hasil wawancara dengan informan Kepala Subbag. Pengelola Informasi Lingkungan DLH Kota Semarang, Lurah Tinjomoyo serta pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari mengungkapkan bahwa sebagian besar mekanisme indikator input telah dilaksanakan cukup optimal, hal ini mengacu pada pedoman teknis pelaksanaan bank sampah. Indikator input dalam penelitian ini mencakup aspek sumberdaya manusia, sumber daya materi (anggaran), sarana prasarana, serta sumber daya pendukung lainnya.

Aspek pertama mengenai sumber daya manusia yang terlibat dalam keberhasilan Kebijakan Peengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari. Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan bank sampah terdiri atas DLH, Bintari selaku LSM, pemangku wilayah setempat yaitu Lurah, Pengurus bank sampah, serta nasabah bank sampah. Pihak-pihak yang terlibat ini sudah mempunyai akses serta

tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan bank sampah. Meskipun demikian, dilihat dari lingkup internal pengurus bank sampah masih sering mengalami tumpang tindih dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Jumlah pengurus yang masih kurang dengan umur yang tidak lagi produktif membuat kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah keberhasilannya menjadi terkendala.

Aspek kedua dalam melihat keberhasilan Kebijakan Peengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari adalah sumber daya materi (anggaran). Sumber anggaran dalam hal ini dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari dilaksanakannya penjualan hasil daur ulang sampah melalui berbagai macam kegiatan perlombaan, sosialisasi serta pameran.

Aspek ketiga dalam indikator ini adalah sarana prasarana. Keberhasilan Kebijakan Peengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari terlihat dari perlengkapan penunjang yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Sarana prasarana dalam hal ini sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan melalui tersedianya kantor pelayanan, wadah penampung sampah, viar, timbangan, mesin pencacah kertas, dan sebagainya. Namun demikian, masih terdapat beberapa perlengkapan sebagai penunjang yang belum tersedia seperti komputer, K3 serta Alat Pelindung Diri.

Aspek terakhir dalam indikator input mencakup sumber daya pendukung berupa sosialisasi dan penyuluhan bank sampah yang sudah dilaksanakan dengan cukup optimal. Berdasarkan wawancara dengan informan diperoleh hasil bahwa pelaksanaan sosialisasi dilakukan semenjak 2 tahun lalu dengan dipegang oleh Bintari selaku Lembaga Swadaya Masyarakat yang berperan besar dalam membantu keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari. Lurah sebagai pemangku wilayah setempat juga ikut andil dalam membuka peluang bank sampah untuk terus berkembang melalui kegiatan perlombaan serta pameran baik antar kelurahan, kecamatan, hingga kota.

2) Indikator Process

Indikator proses yang dimaksud ialah bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam wujud pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan bagaimana efektifitas dan efisiensi dari metode/cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Indikator proses dalam kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik dalam hal ini berjalan cukup baik. Berdasarkan hasil temuan data penelitian melalui wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa aktivitas kegiatan bank sampah telah

mengacu pada proses tata kelola sampah seperti yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yang terdiri atas aspek pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan memanfaatkan kembali sampah dengan menjadikannya sebagai barang yang bisa dipakai kembali (pot dari handuk bekas), sementara penanganan sampah dilakukan mulai dari proses pemilahan, pengumpulan serta pengolahan sampah. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa informan memberikan informasi bahwa efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah ada bank sampah belum sepenuhnya berjalan baik, hal ini terlihat dari pelayanan yang masih cenderung tradisional sehingga terkadang menghalangi proses kegiatan pengelolaan sampah pada bank sampah.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah terdapat 4 aspek yang harus dipenuhi dalam proses tata kelola bank sampah. Aspek tersebut antara lain, struktur kelembagaan, cakupan pelayanan, nasabah, serta Standar Operasional Prosedur (Pasal 12 Permen LHK No.14/2021). Berdasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa informan memberikan informasi bahwa indikator

proses dalam hal tata kelola bank sampah sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keempat aspek yang sebagian besar sudah dilakukan.

3) Indikator Output

Indikator output dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik didasarkan pada target kinerja, partisipasi masyarakat, serta kualitas pelayanannya. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa target kinerja dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah sudah mencapai posisi cukup baik, hal ini dapat terlihat dari adanya kegiatan yang masih berlanjut sampai sekarang. Keberlanjutan dari kebijakan ini sendiri dilakukan dengan tetap menggandeng pendampingan untuk meningkatkan kinerja dari kebijakan itu sendiri. Kualitas pelayanan dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah rata-rata sudah bagus, meskipun dalam beberapa situasi terdapat kesulitan yang berkaitan dengan ranah internal bank sampah. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah sebisa mungkin memberikan usaha untuk mencapai tujuan kepuasan nasabah. Pelayanan pada bank sampah juga ditunjukkan dari keterlibatan pihak-pihak atau kelompok yang memberikan layanan

bagi nasabah atau sekiranya masyarakat yang memerlukan informasi.

Meninjau dari aspek partisipasi masyarakatnya menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah sampai sekarang masih belum terlalu aktif, hal ini terus didorong oleh adanya kegiatan yang sebisa mungkin memberikan motivasi bagi masyarakat dalam mengelola sampah dan menyeter sampahnya ke bank sampah.

4) Indikator Outcomes

Indikator *outcomes* dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah sudah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang memberikan informasi bahwa kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah memiliki dampak/manfaat yang signifikan baik dari kelompok yang terkena kebijakan maupun kelompok masyarakat secara umum. Hasil wawancara dengan informan sebagai pihak yang terkena kebijakan tentu berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga atau instansi tempat informan tersebut berkerja/ berkegiatan, misalnya Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung memperoleh kepercayaan dari masyarakat dalam bertugas di bidang lingkungan sekaligus memperoleh data yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain pemerintah

melalui Dinas Lingkungan Hidup mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat mengenai berbagai solusi atas persoalan lingkungan terutama dalam hal mengelola sampah. Bintari yang juga mendapatkan pengaruh jaringan/ relasi yang semakin luas, Pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari yang juga mendapat pengalaman sekaligus mengalami peningkatan akan kinerja kegiatannya, nasabah yang memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik memberikan dampak dan manfaat bagi banyak pihak. Manfaat yang diperoleh masyarakat secara umum terlihat dari terciptanya lingkungan yang nyaman dan bersih, serta masyarakat yang lebih teredukasi dalam melakukan pengelolaan sampahnya secara mandiri. Indikator outcomes dalam hal ini berbicara tentang pengaruh atau dampak yang diperoleh dari aasuat kebijakan.

2. Kendala keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

1) Pendanaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah

Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik menjelaskan bahwa aspek pendanaan yang menjadi pemasukan pada kegiatan pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari selain difasilitasi oleh CSR, juga diperoleh dari pengadaan *event* tertentu, seperti misalnya kegiatan pameran penjualan produk daur ulang sampah. Kendalanya sendiri terdapat dalam hal pemasaran produk, dimana masih banyak produk-produk yang belum terjual keluar, produk yang terjual hanya mencakup wilayah setempat. Dengan demikian, aspek pendanaan dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang masih membutuhkan perhatian lebih pihak pengelola atau pengurus Bank Sampah Ngudi Lestari dalam mengelola penjualan produk sampah hasil daur ulang sehingga aspek pendanaan dalam kegiatan pengelolaan sampah pada bank sampah tidak semata-mata hanya mengandalkan Pihak Pegadaian selaku CSR.

2) Sumber Daya Manusia

Kendala sumber daya manusia dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada umumnya berasal dari internal, yaitu pihak pengelola atau pengurus Bank

Sampah serta beberapa pihak lain yang ikut terlibat di dalamnya. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari masih memiliki kendala dalam hal sumber daya manusia tepatnya bagian internal yakni pada pihak pengelola atau pengurus bank sampah. Kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah masih memiliki kendala dalam melakukan regenerasi pengurus dikarenakan sifatnya yang masih sosial atau sukarela sehingga diperlukan kesadaran dari masing-masing pengurus. Kendala dalam sumber daya manusia terlihat dari adanya keterbatasan kemampuan pengurus dikarenakan umur yang sudah tidak lagi produktif (sepuh) sehingga membuat proses pelaksanaan kegiatan kurang optimal dan cenderung masih tradisional. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing pengelola atau pengurus bank sampah juga masih belum terlaksana dengan baik, hal ini karena pemberian job yang kurang jelas. Kendala sumber daya manusia dalam kegiatan pada bank sampah juga terlihat dari kesulitan dalam mencari supir sebagai jasa penjemput sampah, hal ini dikarenakan minimnya pengurus laki-laki dan kurangnya perhatian dari pemangku wilayah setempat (Kelurahan). Aspek sumber daya manusia dalam kendala kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari di Kelurahan

Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada hakikatnya berasal dari aspek internal yang berasal dari pihak pengurus bank sampah, seperti keterbatasan pengurus bank sampah akibat minimnya jumlah pengurus, umur yang sudah sepuh, serta sifatnya yang sosial (sukarela dan tidak mendapat gaji).

3) Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomohyo Kecamatan Banyumanik sejauh ini terbilang cukup baik, meskipun terkadang masih memerlukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi secara intens. Kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah perlu dibarengi dengan kegiatan sosialisasi hal ini karena masyarakat dalam mengelola sampah masih bergantung pada suasana hati, bahkan dikatakan bahwa terjadi penurunan jumlah nasabah dari tahun-tahun sebelumnya yang semua berjumlah 300 turun menjadi 219 orang. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah bersamaannya dengan dikeluarkannya SK Lurah Tinjomoyo diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat yang dulunya hanya membuang sampah sembarangan tanpa adanya pengelolaan dapat berdampak

secara langsung terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kendala keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari Kecamatan Banyumanik dilihat dari aspek kesadaran masyarakat sudah cukup baik, hal ini didukung oleh ketersediaan sarana fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat-tempat sampah. Sementara itu, kegiatan sosialisasi penyuluhan dalam kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari masih tetap terus dilakukan guna meningkatkan kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah

4) Kendala lainnya

Kendala dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang selain mencakup 3 (tiga) aspek di atas sebelumnya, juga mencakup aspek lainnya. Hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa informan memberikan informasi bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik memiliki kendala lain berupa aksesibilitas yang masih kurang baik. Aksesibilitas sendiri menurut Tjiptono (2014) merupakan lokasi yang dilalui oleh sarana transportasi dengan indikator mencakup jarak, akses ke tempat lokasi, transportasi. Permukaan tanah yang tidak

rata cukup membuat pihak jasa penjemput sampah merasa kesulitan dalam melakukan tugas menjemput sampah. Hal ini tentu menyebabkan kegiatan pengelolaan sampah pada bank sampah menjadi kurang optimal. Selain itu, penulis juga melakukan observasi di sekitar wilayah tempat pengelolaan sampah pada bank sampah dimana jalan menuju akses sangat sulit untuk dijangkau hal ini dikarenakan struktur tanahnya yang tidak rata.

KESIMPULAN

1. Meninjau dari evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dibuktikan oleh sumberdaya yang menjadi input kebijakan yakni meliputi kapasitas sumber daya manusia, anggaran, fasilitas infrastruktur, serta sumber daya pendukung lainnya telah berjalan cukup baik. Dalam indikator input, terdapat beberapa aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian, seperti aspek kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas, serta sarana prasarana yang masih belum sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam indikator proses sendiri evaluasi pelaksanaan kebijakan juga sudah dikatakan cukup baik, hal ini

ditunjukkan dari aspek tata kelola sampah pada bank sampah dan aspek tata kelola bank sampah yang sebagian besar sudah mengikuti prosedur yang ada, yakni tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Indikator output dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah juga cukup memadai. Hal ini terlihat dari aspek kualitas pelayanan, serta target kinerja yang cukup berproses. Adapun efektivitas pelaksanaannya sendiri masih terbelang menurun sebagai akibat dari adanya Pandemi COVID-19 pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator outcomes pada kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari aspek perolehan dampak dan manfaat yang dirasakan bagi seluruh pihak (aktor) dalam kebijakan, baik dari pihak yang terkena kebijakan maupun masyarakat secara umum. Perolehan manfaat tersebut terlihat dari adanya relasi kerjasama yang semakin meluas, diperolehnya pengalaman, meningkatnya citra positif dalam melakukan tugas dan pekerjaan, lingkungan bersih, meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat, serta terbentuknya kreativitas masyarakat

tentang pengelolaan sampah yang lebih bernilai.

2. Kendala dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik meliputi tiga aspek, yaitu aspek pendanaan, aspek sumber daya manusia serta kesadaran masyarakat. Dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik dilihat dari aspek pendanaan masih terus berjalan dan berprogress, hal ini dapat terlihat dari adanya kegiatan penjualan daur ulang sampah yang masih terus dilakukan dan bantuan operasional dari Pegadaian selaku CSR. Aspek sumberdaya dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah memiliki kendala dalam hal kepengurusan, dimulai dari kapasitas pengurus yang masih kurang dalam mengoperasionalkan aktivitas sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal, minimnya pengurus dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah juga membuat kegiatan berjalan tidak maksimal. Aspek kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah dilihat dari prosesnya sudah mulai menunjukkan

peningkatan, meskipun sempat terjadi penurunan jumlah nasabah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kendala lain dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah Ngudi Lestari di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik terdapat pada aksesibilitas wilayah bank sampah yang sulit untuk dijangkau. Struktur jalan yang tidak rata, bergelombang serta terjal membuat pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Ngudi Lestari menjadi terkendala. Hal ini dibuktikan bahwa dalam mengangkut sampah dari rumah ke bank sampah, supir jasa angkutan sampah masih kesulitan hal ini dikarenakan kondisi viar masih belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan bank sampah.

SARAN

1. Perlunya dilakukan koordinasi secara intens antara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah pada bank sampah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dalam mencapai tujuan kebijakan. Bukan hanya pihak penyelenggara atau pengelola Bank Sampah saja, tetapi juga pihak di luar itu seperti pemerintah, LSM, serta masyarakat. Dalam koordinasi tersebut perlu melakukan peningkatan dan juga perbaikan terhadap kualitas sumber daya dalam organisasi melalui kontribusi, kemampuan, serta kecakapan SDM dalam pelaksanaan berbagai kegiatan operasional. Selain itu pula, perlu dilakukan koordinasi kembali tentang anggaran dana dan penggunaan sarana prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Perlunya pengadaan sosialisasi secara aktif dan berkala kepada masyarakat dalam hal meningkatkan kreativitas agar masyarakat semakin terpacu dan sadar akan pentingnya pengelolaan sampah pada bank sampah sehingga pelaksanaannya dapat terus berkelanjutan. Perhatian dari pemangku wilayah setempat khususnya kelurahan juga diperlukan dalam menyediakan sumberdaya, baik sumber daya materi maupun sarana dan prasarana untuk menjawab persoalan aksesibilitas. Penyediaan sarana prasarana ini sendiri terdiri mencakup transportasi berupa viar sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan bank sampah dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk melakukan kolaborasi dalam mendukung peningkatan terhadap aksesibilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2023). *10 Negara Penghasil Sampah Terbesar di Dunia, Ada Indonesia*. katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/26/10-negara-penghasil-sampah-terbesar-di-dunia-ada-indonesia#:~:text=Indonesia adalah negara penghasil sampah,65%2C2 juta ton sampah.>
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara* (B. A. Saebani (ed.)). Pustaka Setia.
- Annur, C. M. (2022). *Indonesia Masuk 5 Besar Jumlah Penduduk Terbanyak di G20*. katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/01/indonesia-masuk-5-besar-jumlah-penduduk-terbanyak-di-g20>
- Badjuri, A., & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Undip Press.
- Fundrika, B. A. (2022). *Sampah yang Didaur Ulang di Semarang Sedikit, Ini Pentingnya Libatkan Masyarakat Kelola Limbah*. suara.com. <https://www.suara.com/lifestyle/2022/05/23/183500/sampah-yang-visa-didaur-ulang-di-semarang-sedikit-ini-pentingnya-libatkan-masyarakat-kelola-limbah>
- Hadjon, P. M. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hellmut, W. (2003). *Evaluation in Public-Sector Reform*. Edward Elgar.
- Istanabi, T., Miladan, N., Suminar, L., Kusumastuti, K., Aliyah, I., Soedwihajono, S., Utomo, R. P., Werdiningtyas, R. R., & Yudana, G. (2022). *Pengelolaan Bank Sampah sebagai implementasi Ekonomi Kreatif di Bank Sampah Guyub Rukun Dusun Madugondo, Kecamatan Piyungan, Bantul*. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(3), 407–413. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7i3.2765>.
- Joko, P. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Kartasasmita, G. (1995). *Masalah Kebijakan dalam Pembangunan*. STIA-LAN RI.
- Mindarti, L. I. (2016). *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*. UB Press.
- Muchlis, H. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Novelino, A. (2022). *Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, KLHK Sindir Belanja Online*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online>
- Pamudji. (1987). *Ekologi Administrasi Negara*. Bina Aksara.
- Purwo, S. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Research Center for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Primantoro, A. Y. (2023). *Tiga Permasalahan Mendasar Sampah yang Tidak Kunjung Selesai*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/04/06/tiga-permasalahan-mendasar-sampah-yang-tidak-kunjung-selesai>

- Qudstia, F. I. (2023). *DLH Kota Semarang Targetkan 1000 Bank Sampah Hingga Akhir Tahun*. joglojateng.com. <https://joglojateng.com/2023/07/04/dlh-kota-semarang-targetkan-1000-bank-sampah-hingga-akhir-tahun/>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani (ed.)). Antasari Press.
- Setiawan, R. (2015). *Pedoman Pendirian Bank Sampah Posdaya dan Manajemen Administrasi Bank Sampah Terkomputerisasi*. Yayasan Damandiri.
- Stillman, R. J. I. (1991). *Preface to Public Administration: A search for themes and direction*. St. Martin's Press.
- Syauqi, A. H. (2022). *Volume Sampah Jateng Capai 6 Juta Ton per Hari, Tak Semua Terkelola*. detikJateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6147061/volume-sampah-jateng-capai-6-juta-ton-per-hari-tak-semua-terkelola>
- Wibisono, L. (2019). *Inilah Kendala Dalam Optimalisasi Bank Sampah di Kota Semarang*. halosemarang.id. <https://halosemarang.id/inilah-kendala-dalam-optimalisasi-bank-sampah-di-kota-semarang>
- Wicaksono, I., & Warsono, H. (2020). Manajemen dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah 'Ngudi Lestari' Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(2), 1–15.
- William N, D., Penerjemah: Wibawa, S., Asitadani, D., Hadna, A. H., & Purwanto, E. A. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.